



Analisis Kebijakan Tata Niaga Subsidi LPG 3 Kg di Tingkat Daerah: Studi Implementasi di Kabupaten Bantul

Elmi Wahyuni^{1*}, Budiman Rusli¹, Candradewini Candradewini¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Indonesia

*Corresponding author email: elmi23001@mail.unpad.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Approved May 30, 2026

Keywords:

LPG 3 Kg Subsidy, Distribution Governance; Public Policy, Mixed Methods, Bantul Regency

ABSTRACT

The LPG 3 Kg subsidy policy is an important instrument of social protection; however, its implementation continues to face various distribution and governance challenges at the local level. This study aims to analyze the implementation of the LPG 3 Kg subsidy distribution policy in Bantul Regency, identify key implementation problems, and formulate the most feasible policy alternatives based on the rational policy analysis framework of Patton and Sawicki. The study employs a mixed-methods approach with a convergent design, combining qualitative data (in-depth interviews with local government officials, Pertamina, Hiswana Migas, agents, and LPG outlets) and quantitative data (a survey of 105 LPG 3 Kg subsidy users), which are analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression. The findings indicate that policy implementation is characterized by persistent targeting inaccuracies, dominance of purchases through informal retailers, and weak administrative operability in the application of the Merchant Apps Pangkalan (MAP). Regression analysis reveals that the fairness variable ($\beta = 0.479$; $p < 0.001$) and administrative operability ($\beta = 0.372$; $p < 0.001$) are the most significant determinants of policy effectiveness. Based on the evaluation of policy alternatives using an evaluation matrix, strengthening the NIK-based verification system and integrating socio-economic data with MAP is identified as the most rational and feasible policy option for implementation in Bantul Regency. This study recommends improving data-driven LPG 3 Kg distribution governance as a strategic measure to enhance the effectiveness, equity, and accountability of energy subsidies at the local level.

ABSTRAK

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg merupakan instrumen penting perlindungan sosial, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan tata niaga di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tata niaga subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul, mengidentifikasi permasalahan utama, serta merumuskan alternatif kebijakan yang paling layak berdasarkan kerangka analisis kebijakan rasional Patton dan Sawicki. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain konvergen, melalui pengumpulan data kualitatif (wawancara dengan pemerintah daerah, Pertamina, Hiswana Migas, agen, dan pangkalan) serta data kuantitatif (survei terhadap 105 responden penerima LPG 3 Kg) yang dianalisis secara deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih ditandai oleh ketidaktepatan sasaran subsidi, dominasi pembelian melalui pengecer, serta lemahnya operabilitas administratif dalam penerapan Merchant Apps Pangkalan (MAP). Analisis regresi menunjukkan bahwa variabel keadilan ($\beta = 0,479$; $p < 0,001$) dan operabilitas administratif ($\beta = 0,372$; $p < 0,001$) merupakan determinan utama efektivitas kebijakan. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan menggunakan matriks evaluasi, penguatan sistem verifikasi berbasis NIK dan integrasi data sosial-ekonomi dengan MAP dinilai sebagai alternatif

paling rasional dan feasible untuk diterapkan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 Kg berbasis data sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan akuntabilitas subsidi energi di tingkat daerah.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Wahyuni, E., Rusli, B., & Candradewini, C. (2026). Analisis Kebijakan Tata Niaga Subsidi LPG 3 Kg di Tingkat Daerah: Studi Implementasi di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(2), 2214–2232. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i2.5837>

PENDAHULUAN

Energi merupakan kebutuhan dasar rumah tangga dan pelaku usaha kecil, sehingga kebijakan subsidi energi di Indonesia menempati posisi strategis dalam melindungi daya beli kelompok rentan. Program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg yang dimulai tahun 2007 dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada minyak tanah, menekan beban subsidi BBM, dan menyediakan bahan bakar yang lebih efisien dan relatif lebih bersih bagi rumah tangga serta usaha mikro (KESDM, n.d.). Sejak saat itu, LPG 3 Kg menjadi komoditas energi pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus sumber tekanan fiskal karena nilai subsidiya terus meningkat seiring pertumbuhan konsumsi dan volatilitas harga energi global.

Berdasarkan katadata.co.id. dalam beberapa tahun terakhir, alokasi subsidi LPG 3 Kg menunjukkan fluktuasi dengan tren nilai yang tetap tinggi, mencerminkan besarnya komitmen fiskal pemerintah sekaligus tantangan keberlanjutan kebijakan (Kusnandar, 2025). Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi LPG 3 Kg sekitar Rp87,6 triliun dengan kuota 8,17 juta metrik ton, setelah pada periode sebelumnya realisasi penyaluran berulang kali melampaui kuota yang ditetapkan (emedia.dpr.go.id, 2025). Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengakselerasi transformasi penyaluran subsidi LPG 3 Kg dari skema distribusi relatif terbuka menuju distribusi lebih tertutup dan berbasis data penerima manfaat yang terverifikasi.

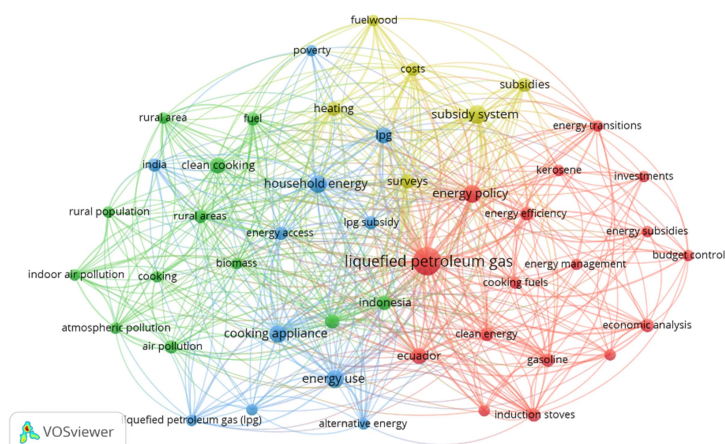
Transformasi kebijakan tersebut diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007. Perpres Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, serta Perpres Nomor 71 Tahun 2021 yang menegaskan sasaran rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani. Pada tahapan teknis, Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 dan regulasi turunannya memperkenalkan skema distribusi tertutup berbasis pendataan NIK, pencatatan digital melalui Merchant Apps Pangkalan (MAP), serta pembatasan penyalur resmi. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi, memperbaiki tata kelola distribusi, dan mengurangi kebocoran subsidi kepada kelompok non-sasaran yang selama ini banyak ditemukan dalam evaluasi penyaluran LPG 3 Kg.

Di tingkat daerah, implementasi transformasi kebijakan tersebut memunculkan dinamika tersendiri, salah satunya di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 2025 Kabupaten Bantul menerima tambahan kuota LPG 3 Kg hingga sekitar 38.657 metrik ton, dimana jumlah ini lebih banyak 15% dari subsidi tahun sebelumnya (Hasanudin, 2025). dengan distribusi melalui puluhan agen dan ribuan pangkalan yang diharapkan mampu menjamin ketersediaan bagi rumah tangga miskin, UMKM, petani, dan nelayan sasaran. Namun, berbagai keluhan publik menunjukkan masih terjadinya kelangkaan, *panic buying*, serta kenaikan harga di warung hingga sekitar Rp22.000–Rp28.000 per tabung (Maharani, 2025), yang jelas melampaui Harga Eceran Tertinggi Rp18.000 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur DIY

Nomor 457/KEP/2024. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain regulasi dan kondisi implementasi di lapangan, terutama pada mata rantai distribusi terakhir yang melibatkan pangkalan dan pengecer.

Pengetatan tata niaga melalui larangan sementara penjualan LPG 3 Kg oleh pengecer tidak resmi pada 1 Februari 2025, yang kemudian direvisi dengan mekanisme pendaftaran pengecer sebagai sub-pangkalan, semakin menonjolkan pentingnya pengaturan ulang struktur distribusi di tingkat lokal. Di satu sisi, pembatasan penyalur diharapkan memperkuat pengawasan harga dan volume, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi aksesibilitas bagi masyarakat yang bergantung pada jaringan pengecer tradisional. Konteks sosial ekonomi Bantul yang ditandai dengan Upah Minimum Kabupaten relatif lebih rendah dibanding kota sekitarnya membuat masyarakat berpenghasilan rendah sangat sensitif terhadap kenaikan harga LPG 3 Kg di atas HET.

Secara akademik, kajian mengenai subsidi LPG 3 Kg secara global telah berkembang pesat dan mengulas beragam tema, mulai dari kebijakan energi, efisiensi fiskal, analisis dampak ekonomi, seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1. Visualisasi Analisis Kata Kunci dengan VOS Viewer

Sumbe: Diolah oleh Penulis

Visualisasi bibliometrik pada gambar 1 diperoleh berdasarkan hasil analisis bibliometrik penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal internasional scopus dengan menggunakan kata kunci “Subsidized LPG” dan “LPG Subsidy” dengan hasil pencarian sebanyak 58 jurnal menunjukkan masih terbatasnya penelitian yang menyoroti secara spesifik tata niaga subsidi LPG 3 Kg pada tingkat daerah, terutama yang mengkaji secara terintegrasi mekanisme distribusi, efektivitas kebijakan, serta operabilitas administratif berbasis sistem digital seperti MAP. Di sisi lain, riset terdahulu di berbagai daerah umumnya menekankan aspek pengawasan, variasi harga, dan kelangkaan, tetapi belum banyak yang memadukan analisis kuantitatif dan kualitatif dalam kerangka analisis kebijakan rasional untuk menilai alternatif perbaikan tata niaga di tingkat lokal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis kebijakan tata niaga subsidi LPG 3 Kg di tingkat daerah dengan fokus pada implementasi di Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan rasional Patton dan Sawicki dengan tujuan mendefinisikan permasalahan utama tata

niaga, menetapkan kriteria evaluasi, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif kebijakan, serta merumuskan rekomendasi (Patton et al., 2015).

METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods dengan desain konvergen di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, kemudian menggabungkan dan membandingkan hasil keduanya (Creswell, J. W., & Poth, 2017). Tujuan utama desain ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai gambaran komprehensif tata niaga subsidi LPG 3 kg di Kabupaten Bantul; data dikumpulkan pada periode yang relatif bersamaan, dianalisis secara terpisah, lalu hasilnya dibandingkan dan diintegrasikan untuk melihat konsistensi maupun saling melengkapi temuan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bantul yang dipilih secara purposif karena merupakan penerima tambahan kuota LPG 3 kg dan menghadapi dinamika signifikan pasca penetapan distribusi pada 2025, dengan rangkaian kegiatan meliputi penyusunan instrumen, perizinan, pengumpulan data (wawancara, kuesioner, dan studi dokumen), serta analisis dan penulisan. Adapun sumber data pada artikel ini terdiri dari Sumber data terdiri dari data primer (wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, Pertamina, Hiswana Migas, agen, pangkalan, serta kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat sebagai penerima subsidi) dan data sekunder (regulasi, laporan resmi, dan publikasi terkait kebijakan subsidi LPG 3 kg).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Kualitatif

Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul tampak jelas dari hasil wawancara dengan DKUKMPP, Hiswana Migas, dan Agen PT Sinar Putra Pertamina yang bersama-sama menjalankan kerangka nasional (Perpres No. 70 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 Kg ; Kepmen ESDM 37/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Ulang Gas Tertentu Tepat Sasaran dan SK Gubernur DIY Nomor 457 /KEP/2024 tentang HET LPG 3 Kg) ke level operasional daerah. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Sarana DKUKMPP Bantul menjelaskan bahwa dinas menjalankan peran sebagai pelaksana ketentuan pusat, yaitu memastikan subsidi LPG 3 Kg berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran melalui pemantauan di tingkat agen dan pangkalan, sehingga secara implisit mereka merujuk pada kebijakan nasional sebagai payung hukum. Selain itu, dalam aspek harga beliau juga menegaskan bahwa DKUKMPP mengacu pada SK Gubernur DIY mengenai HET LPG 3 Kg sebesar Rp18.000 di pangkalan dan melakukan monitoring agar harga di lapangan tidak jauh melampaui ketentuan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh wawancara dengan Hiswana Migas menambahkan bahwa HET DIY baru dua kali ditetapkan (2015 dan 2024) dan setelah itu mereka melakukan sosialisasi berjenjang ke agen dan pangkalan agar tahu bahwa harga dari agen ke pangkalan adalah Rp15.450 dan di pangkalan Rp18.000, serta menyebut bahwa mereka juga diawasi BPK, Dirjen Migas, Pertamina dan Pemda terkait HET. Di sisi kelembagaan distribusi, semua agen wajib menjadi anggota Hiswana karena untuk perpanjangan badan usaha ke Pertamina diperlukan surat rekomendasi dari Hiswana, yang mengaitkan aspek perizinan usaha dengan tata niaga LPG 3 Kg di daerah.

Pada tahap pelaksanaannya, distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Bantul berjalan melalui alur yang relatif jelas dan berjenjang, dimulai dari Pertamina ke agen, kemudian ke pangkalan, dan selanjutnya ke sub-pangkalan atau langsung ke masyarakat. Agen memegang peran kunci sebagai penghubung antara kuota besar yang ditetapkan Pertamina dengan kebutuhan riil di

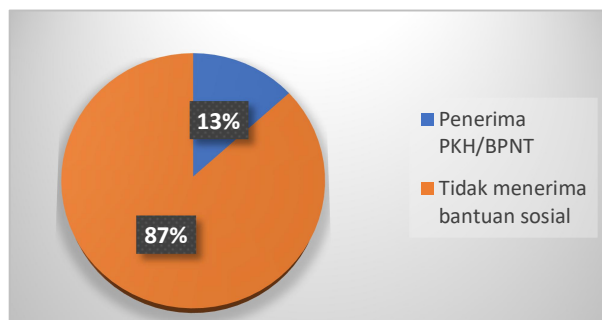
tingkat pangkalan. Besaran kuota yang diterima tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah mengikuti kondisi lokal, terutama berdasarkan permintaan Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pertamina, seperti saat libur panjang, musim hajatan, atau meningkatnya jumlah wisatawan. Dalam situasi tertentu, penyesuaian ini dilakukan melalui penambahan kuota bersifat fakultatif agar pasokan tetap terjaga. Sementara itu, penetapan pangkalan dilakukan melalui proses yang terencana, mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, pengaturan jarak antar pangkalan, hingga survei kelayakan lokasi oleh agen, sebelum akhirnya diformalkan melalui perjanjian kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga dan diikuti penetapan jadwal distribusi serta mekanisme pembayaran di muka.

Di tingkat hilir, pelayanan LPG 3 kg di pangkalan secara bertahap bergeser dari pola terbuka menjadi lebih selektif seiring penerapan Merchant Apps Pangkalan (MAP) sebagai alat pencatatan dan verifikasi konsumen. Setiap pembeli wajib menyerahkan NIK untuk diverifikasi melalui MAP, sehingga aplikasi ini berfungsi sebagai penyaring awal penyaluran LPG subsidi. Bagi agen, MAP dipandang sebagai “rapor digital” karena pelaksanaannya diawasi ketat oleh Pertamina, di mana pelanggaran pangkalan dapat berdampak langsung pada agen. Meski demikian, MAP masih berada dalam fase transisi pihak DKUKMPP Bantul melihatnya sebagai instrumen pengendali yang kelak menjadi dasar pembatasan volume pembelian, sementara di tingkat operasional agen menerapkan pembatasan praktik sementara, dan Hiswana Migas menegaskan bahwa saat ini MAP pada dasarnya masih berfungsi sebagai alat pencatatan karena belum ada ketentuan final mengenai kriteria penerima subsidi. Kedepan, MAP diharapkan terintegrasi dengan data penerima bantuan sosial agar penyaluran LPG 3 kg semakin tepat sasaran.

Dalam konteks tersebut, kebijakan yang diberlakukan pada 1 Februari 2025 yang berupa pelarangan penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer dan mengonsolidasikan penjualan LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi membawa perubahan nyata di lapangan. Meskipun dari sisi hulu alur distribusi dinilai relatif tidak berubah, di tingkat hilir terjadi lonjakan tekanan permintaan karena konsumen yang sebelumnya membeli di pengecer kini langsung mendatangi pangkalan, memicu antrean lebih panjang, *panic buying*, serta ketegangan layanan, terutama ketika transaksi tertahan akibat kendala verifikasi NIK atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan baru. Dalam konteks tersebut, pengawasan kebijakan di Bantul dijalankan melalui mekanisme berlapis yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, agen, hiswana migas, dan partisipasi masyarakat. DKUKMPP melakukan pengawasan langsung terhadap ketepatan sasaran dan kepatuhan HET melalui inspeksi lapangan, termasuk metode *mystery shopper*, serta menindaklanjuti aduan masyarakat melalui kanal e-lapor. Sementara itu, Pertamina dan agen memanfaatkan data MAP serta klausul kontraktual untuk menjatuhkan sanksi berjenjang terhadap pelanggaran pangkalan. Meski demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan mendasar, mulai dari belum jelasnya kriteria operasional penerima subsidi berbasis kondisi sosial-ekonomi, keterbatasan sosialisasi yang membuat masyarakat menunjukkan sikap resistensi dan penolakan terhadap kebijakan baru (termasuk penggunaan KTP untuk pembelian LPG 3 Kg karena takut disalahgunakan), kendala teknis dan literasi digital dalam penggunaan MAP, hingga lemahnya dasar hukum untuk menjangkau sub-pangkalan dan pengecer non-formal. Berbagai kendala ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pengendalian distribusi, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan kredibilitas kebijakan LPG 3 kg secara keseluruhan.

Hasil Penelitian Kuantitatif

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 105 responden penerima subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul yang terdiri dari rumah tangga, pelaku UMKM, dan petani yang tercatat sebagai penerima manfaat dalam data DKUKMPP. Untuk memberikan gambaran awal yang lebih rinci terkait responden, berikut adalah karakteristik responden berdasarkan status sebagai penerima subsidi LPG 3 Kg

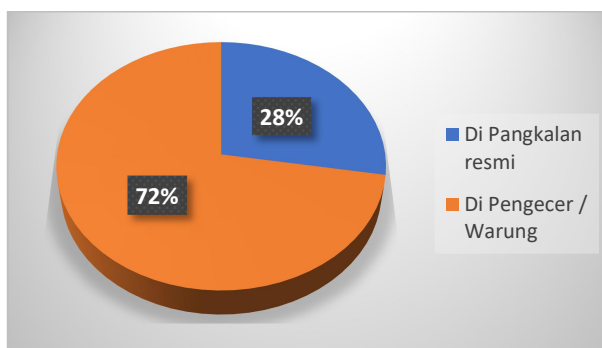


Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Penerima Bantuan/Subsidi

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner (diolah oleh penulis)

Dari gambar 2 tersebut, mayoritas responden tidak menerima bantuan sosial seperti PKH/BPNT, yaitu sebesar 87%, sedangkan responden yang terdaftar sebagai penerima PKH/BPNT hanya 13%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden pengguna LPG 3 Kg berada di luar skema bantuan sosial formal, sehingga mengindikasikan adanya potensi ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 Kg, di mana kelompok non-penerima bantuan masih mendominasi akses terhadap LPG bersubsidi.

Selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan tempat pembelian LPG 3 Kg, data ini digunakan untuk melihat pola pembelian LPG 3 Kg oleh masyarakat serta hubungannya dengan kemudahan akses dan pelaksanaan kebijakan distribusi di lapangan.

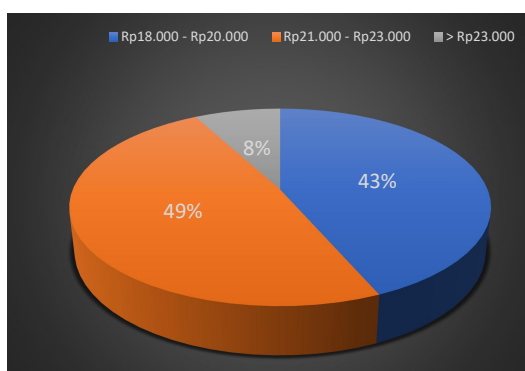


Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Pembelian LPG 3 Kg

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner (diolah oleh penulis)

Berdasarkan gambar 3 tersebut, sebagian besar responden membeli LPG 3 Kg melalui pengecer atau warung, yaitu sebesar 72%, sedangkan 28% responden membeli LPG 3 Kg langsung di pangkalan resmi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengecer masih menjadi saluran utama pembelian LPG 3 Kg, yang mengindikasikan keterbatasan akses masyarakat ke pangkalan resmi serta berpotensi memengaruhi efektivitas pengendalian harga dan tata niaga LPG 3 Kg di lapangan.

Analisis deskriptif selanjutnya menyajikan informasi mengenai harga pembelian LPG 3 Kg di tingkat masyarakat. Data ini digunakan untuk menggambarkan variasi harga yang dibayar konsumen serta menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan harga LPG 3 Kg berjalan sesuai ketentuan di lapangan.

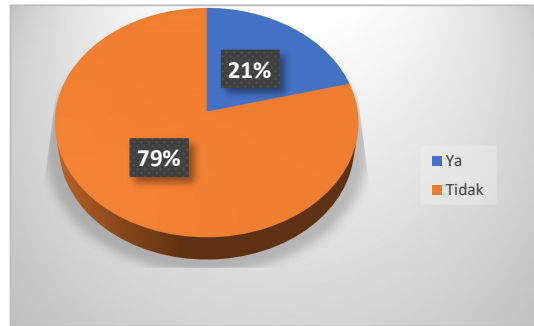


Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Harga Pembelian LPG 3 Kg

Sumber : Data Primer (Diolah Oleh Penulis)

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat membeli LPG 3 Kg dengan harga di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Sebanyak 49% responden membeli LPG 3 Kg pada kisaran harga Rp21.000–Rp23.000, sementara 43% responden masih dapat membeli pada kisaran Rp18.000–Rp20.000 yang relatif mendekati HET. Namun demikian, terdapat 8% responden yang harus membeli LPG 3 Kg dengan harga di atas Rp23.000, yang menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup tinggi di tingkat konsumen. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan HET telah ditetapkan, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif, terutama di wilayah atau saluran distribusi tertentu, sehingga masyarakat masih harus menanggung harga LPG 3 Kg yang lebih mahal dari ketentuan resmi.

Terakhir , analisis deskriptif berdasarkan penggunaan KTP untuk pembelian LPG 3 Kg yang digunakan untuk melihat apakah proses pembelian dilakukan sesuai administrasi atau tidak.



Gambar 5. Persentase Responden Berdasarkan Penggunaan KTP dalam Pembelian LPG 3 Kg

Sumber : Data primer (diolah oleh penulis)

Berdasarkan gambar 5 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum menggunakan KTP dalam pembelian LPG 3 kg, dengan persentase sebesar 79%, sementara hanya 21% responden yang menyatakan menggunakan KTP. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pendataan konsumen LPG 3 kg melalui penggunaan KTP belum berjalan secara optimal di tingkat lapangan, khususnya pada tahap transaksi pembelian. Rendahnya penggunaan KTP dapat mencerminkan lemahnya pengawasan, keterbatasan sosialisasi kebijakan, serta belum konsistennya penerapan aturan oleh pangkalan atau agen, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kg.

Setelah memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik responden dan pola distribusi LPG 3 Kg di lapangan, pembahasan selanjutnya berfokus pada hasil analisis kuantitatif menggunakan SPSS. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kecenderungan penilaian responden terhadap setiap dimensi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan implementasi, keberlangsungan politik, dan administrasi serta menguji pengaruhnya terhadap efektivitas tata niaga subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul.

Uji Kelayakan Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kevalidan suatu instrumen penelitian dengan ketentuan $r_{hitung} > r_{tabel}$. (Raharjo, 2014)

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Butir	R_{hitung}	R_{tabel} (Nilai n =105, sig. : 0,05)	Keterangan
1	0,724	0,191	Valid
2	0,749	0,191	Valid
3	0,639	0,191	Valid
4	0,444	0,191	Valid
5	0,620	0,191	Valid
6	0,712	0,191	Valid
7	0,641	0,191	Valid
8	0,562	0,191	Valid
9	0,628	0,191	Valid
10	0,454	0,191	Valid
11	0,696	0,191	Valid
12	0,639	0,191	Valid

Sumber : Data primer diolah menggunakan SPSS 29 Ver. oleh penulis)

Berdasarkan tabel di atas, seluruh butir pertanyaan memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar daripada r_{tabel} . Nilai r_{hitung} tersebut berada di angka 0,444 hingga 0,749. Ini menunjukkan bahwa seluruh item dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dan setiap butir pertanyaan memiliki hubungan yang cukup kuat hingga sangat kuat dengan total skor, sehingga mampu mewakili variabel yang diukur

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi suatu variable (Ramadhany, 2024)

Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas

Realibility Statistic		
Cronbach's Alpha	N of Item's	Keterangan
0.856	12	Reliabilitas

Sumber : Hasil sebaran kuesioner (diolah menggunakan SPSS 29 Ver. oleh penulis)

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel di atas, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,857. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel atau konsisten, karena nilainya berada di atas batas minimum reliabilitas yaitu 0,60. Dengan demikian, berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, seluruh butir kuesioner dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	R Square	F _{hitung}	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig.
	0,594				
Regression		28.912			< 0,001
Konstanta			1,049		
Efisiensi (X1)			-0,115	-1,374	0,173
Keadilan (X2)			0,479	5,286	< 0,001
Kelayakan Implementasi (X3)			0,189	2,041	0,044
Keberlangsungan Politik (X4)			0,040	0,349	0,728
Operabilitas Administratif (X5)			0,372	4,976	< 0,001
a. Dependent Variable: Efektivitas					

Sumber : Hasil sebaran kuesioner (diolah menggunakan SPSS 29 Ver. oleh penulis)

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,049 - 0,115X_1 + 0,479 X_2 + 0,189X_3 + 0,040X_4 + 0,372X_5$$

Berdasarkan persamaan tersebut, menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan (Y) dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu efisiensi (X_1), keadilan (X_2), kelayakan implementasi (X_3), keberlangsungan politik (X_4), dan administrasi/operabilitas (X_5).

Berikut adalah penjelasan dan konfirmasi temuan antar metode :

- a) Keadilan (X_2) : Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel keadilan (X_2) merupakan faktor paling dominan dan signifikan dalam memengaruhi efektivitas kebijakan tata niaga subsidi LPG 3 Kg ($\beta = 0,479$; $p = 0,001$). Temuan ini mengindikasikan bahwa ketepatan sasaran distribusi subsidi menjadi penentu utama efektivitas kebijakan. Hasil kuantitatif tersebut

selaras dengan temuan kualitatif yang menunjukkan adanya mistargeting sistemik, di mana LPG 3 Kg dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa seleksi status ekonomi. Data kuantitatif memperlihatkan bahwa 87% responden bukan penerima bantuan sosial namun tetap mengonsumsi LPG 3 Kg, sementara dominasi pembelian melalui pengecer (72%) semakin melemahkan mekanisme pengawasan sasaran. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa variabel keadilan menjadi prediktor terkuat, karena kebocoran subsidi kepada kelompok non-sasaran berdampak langsung pada persepsi efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

- b) Operabilitas administrative : Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel operabilitas administratif (X_5) memiliki pengaruh signifikan kedua terbesar terhadap efektivitas kebijakan tata niaga subsidi LPG 3 Kg ($\beta = 0,372$; $p = 0,001$), yang menegaskan pentingnya mekanisme administrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan kuantitatif ini diperkuat oleh hasil kualitatif yang mengungkap kendala penerapan Merchant Apps Pangkalan (MAP), baik dari sisi kompleksitas teknis bagi pangkalan maupun rendahnya penerimaan masyarakat terhadap kewajiban penggunaan NIK/KTP. Hal tersebut tercermin dalam data survei yang menunjukkan bahwa 80,2% responden menyatakan pembelian LPG 3 Kg tidak memerlukan KTP atau Kartu Keluarga, sehingga prosedur administrasi belum berjalan konsisten di lapangan. Ketidaktertiban administrasi berdampak langsung pada lemahnya pengawasan distribusi dan pengendalian harga, yang tercermin dari temuan bahwa 49% responden membeli LPG 3 Kg dengan harga Rp21.000–Rp23.000, jauh di atas HET Rp18.000. Dengan demikian, signifikansi variabel operabilitas administratif mencerminkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kesederhanaan sistem administrasi, kesiapan pangkalan, dan penerimaan masyarakat terhadap prosedur formal, karena tanpa perbaikan pada aspek tersebut, digitalisasi melalui MAP belum mampu berfungsi optimal sebagai instrumen pengendalian distribusi dan penjamin ketepatan sasaran subsidi.
- c) Kelayakan Implementasi : Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel kelayakan implementasi (X_3) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan, meskipun dengan kekuatan yang relatif lebih lemah dibandingkan variabel lain ($\beta = 0,189$; $p = 0,044$). Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek kelayakan pelaksanaan tetap berperan dalam menentukan efektivitas kebijakan, namun belum menjadi faktor dominan. Hasil kuantitatif tersebut selaras dengan temuan kualitatif terkait kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer per 1 Februari 2025, yang memicu panic buying, kelangkaan pasokan, serta lonjakan permintaan di pangkalan resmi tanpa diimbangi kesiapan sarana, prasarana, dan kapasitas pelayanan. Keluhan responden mengenai antrian panjang dan meningkatnya waktu tunggu semakin menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya layak diimplementasikan tanpa tahapan transisi yang memadai. Dengan demikian, signifikansi variabel kelayakan implementasi mencerminkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementasi di lapangan, di mana kebijakan yang secara normatif tepat belum tentu efektif tanpa dukungan kesiapan aktor dan infrastruktur pendukung.

Selain saling mengonfirmasi, terdapat hasil regresi yang mengalami kontradiksi berikut adalah penjelasan diskrepansinya :

- a) Efisiensi (X_1) Ketidaksignifikanan variabel X_1 terhadap efektivitas kebijakan secara statistik mengindikasikan bahwa efisiensi biaya dan struktur distribusi belum menjadi faktor penentu dalam persepsi efektivitas kebijakan oleh responden. Meskipun temuan kualitatif menunjukkan adanya rantai distribusi LPG 3 Kg yang relatif panjang mulai dari Pertamina, agen, pangkalan, hingga pengecer informal yang berimplikasi pada perbedaan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), kondisi tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam hasil

kuantitatif. Data deskriptif menunjukkan bahwa sekitar 72% responden membeli LPG melalui pengecer dan 79% merupakan rumah tangga, yang secara teoritis paling terdampak oleh inefisiensi distribusi. Namun, responden rumah tangga cenderung lebih memprioritaskan kemudahan akses dan ketersediaan LPG dibandingkan pertimbangan efisiensi struktural tata niaga. Selama LPG 3 Kg dapat diperoleh dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selisih harga akibat panjangnya rantai distribusi tidak dipersepsikan sebagai persoalan utama. Oleh karena itu, efisiensi tata niaga kurang dirasakan secara langsung di tingkat konsumen akhir, sehingga tidak muncul sebagai variabel yang signifikan dalam analisis kuantitatif.

- b) Keberlangsungan Politik (X_4) : Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa variabel keberlangsungan politik (X_4) memiliki pengaruh lemah dan tidak signifikan terhadap efektivitas kebijakan tata niaga LPG 3 Kg ($\beta = 0,040$; $p = 0,728$), yang mengindikasikan bahwa aspek politik bukan pertimbangan utama responden dalam menilai efektivitas kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengevaluasi kebijakan dari perspektif operasional sehari-hari, seperti kemudahan akses dan ketersediaan LPG, dibandingkan dinamika politik yang melatarbelakanginya. Namun demikian, temuan kualitatif mengungkap adanya resistensi terhadap kebijakan nasional, khususnya pelarangan penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer, yang memicu protes pelaku usaha, *panic buying*, serta kritik dari asosiasi terkait. Diskrepansi tersebut mencerminkan perbedaan sudut pandang antara persepsi konsumen dan aktor kebijakan, di mana konflik politik lebih dirasakan oleh pelaku distribusi dan pemangku kepentingan, bukan oleh konsumen akhir. Meskipun tidak signifikan secara statistik, temuan kualitatif menegaskan bahwa sosialisasi kebijakan tetap penting untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap perubahan kebijakan.

Analisis Kebijakan Tata Niaga Subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul

Definisi Masalah

Dari hasil temuan kuantitatif dan kualitatif beberapa masalah dalam implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul yaitu :

- a. Ketidaktepatan sasaran distribusi LPG 3 Kg

Masalah ini masih terjadi karena kriteria penerima subsidi belum dirumuskan secara operasional dan terdigitalisasi dengan baik dikarenakan semua konsumen yang memiliki KTP dan dapat mengakses pangkalan atau pengecer, mereka masih dapat membeli LPG 3 Kg, sehingga rumah tangga mampu dan pelaku usaha non-mikro tetap berkompetisi dengan kelompok miskin dalam memperebutkan pasokan yang terbatas. Masalah ketidaktepatan sasaran ini juga diperkuat oleh hasil analisis regresi dimana variabel Keadilan (X_2) memiliki pengaruh paling signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan dengan koefisien 0,479 ($p < 0,001$). Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa 87% masyarakat yang menggunakan LPG 3 Kg tidak termasuk penerima bantuan sosial, sehingga secara kategoris tidak tergolong sebagai penerima subsidi energi. Artinya, ketidaktepatan sasaran tidak hanya menjadi isu normatif, tetapi juga berkontribusi substantif terhadap rendahnya efektivitas kebijakan di lapangan.

- b. Dominasi pembelian melalui pengecer dan distorsi harga

Pembelian LPG 3 Kg melalui pengecer merupakan mekanisme pembelian di luar rantai distribusi formal dan pengawasan langsung pemerintah daerah, sehingga memperpanjang rantai distribusi dan memperbesar peluang kebocoran subsidi ke kelompok yang tidak berhak. Masalah ini diperkuat dengan data karakteristik responden yaitu sebanyak 72% masih membeli di pengecer/warung. Kondisi ini tentunya berkontribusi pada munculnya harga jual di tingkat

warung yang melampaui HET Rp18.000 per tabung, sebagaimana data statistik yang diperoleh yaitu sebanyak 49% responden membeli LPG 3 Kg dengan kisaran harga Rp21.000 – Rp.23.000.

c. Kompleksitas penggunaan MAP dan kurangnya sosialisasi kebijakan

Implementasi *Merchant Apps Pangkalan* (MAP) dalam tata niaga subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul masih menghadapi kendala operasional dan lemahnya sosialisasi, baik di tingkat pangkalan maupun masyarakat. Pengelola pangkalan menilai aplikasi MAP relatif rumit dan memerlukan pelatihan khusus, sementara di sisi konsumen masih banyak yang tidak mengetahui kewajiban pencatatan transaksi dan penggunaan KTP/NIK, bahkan menunjukkan resistensi karena kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Kendala teknis seperti gangguan kecepatan aplikasi, ketidakseragaman prosedur verifikasi antar-pangkalan, serta penolakan transaksi semakin memperlebar kesenjangan antara desain sistem distribusi berbasis digital dengan kapasitas implementasi di lapangan. Kondisi ini selaras dengan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa operabilitas administratif (X_5) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan tata niaga subsidi LPG 3 Kg ($\beta = 0,372$; $p < 0,001$), yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kesederhanaan prosedur administrasi, kesiapan pelaksana, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem MAP. Selain itu, berdasarkan hasil survey yang dilakukan 79% konsumen membeli LPG 3 Kg tanpa menyertakan KTP untuk verifikasi data sehingga kondisi ini juga menunjukkan bahwa implementasi regulasi penggunaan KTP ketika melakukan pembelian LPG 3 Kg belum berjalan dengan optimal.

Penetapan Kriteria Evaluasi

Dalam analisis kebijakan menurut Patton dan Sawicki, penetapan kriteria evaluasi menjadi tahap penting karena menentukan bagaimana suatu kebijakan dinilai keberhasilannya. Pada tahap ini, kebijakan tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya aturan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut bekerja di lapangan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kriteria evaluasi berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja kebijakan secara lebih terarah dan kontekstual.

Penelitian ini menetapkan kriteria evaluasi dengan mempertimbangkan karakter kebijakan subsidi LPG 3 Kg yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya dituntut efisien secara anggaran, tetapi juga harus adil, mudah dijalankan, dan didukung oleh sistem administrasi yang memadai. Atas dasar tersebut, kriteria yang digunakan meliputi efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan implementasi, operabilitas administratif, dan keberlangsungan politik, yang secara bersama-sama mencerminkan dimensi teknis, sosial, dan kelembagaan dari tata niaga LPG 3 Kg.

Efektivitas digunakan untuk menilai apakah kebijakan benar-benar mampu menjamin ketersediaan LPG 3 Kg dan menjaga harga tetap terjangkau bagi kelompok sasaran, sementara efisiensi melihat perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan manfaat yang dihasilkan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi bukan faktor penentu utama efektivitas kebijakan. Sebaliknya, keadilan justru menjadi aspek yang paling berpengaruh, yang tercermin dari masih adanya ketimpangan akses dan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi LPG 3 Kg di tingkat masyarakat.

Selain itu, kelayakan implementasi dan operabilitas administratif digunakan untuk melihat kesiapan pelaksana kebijakan, kejelasan prosedur, serta efektivitas pengawasan dalam praktik distribusi LPG 3 Kg. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas teknis dan lemahnya pengawasan masih menjadi kendala utama implementasi kebijakan di tingkat daerah. Sementara itu, keberlangsungan politik tetap dipertimbangkan untuk memastikan bahwa

kebijakan subsidi LPG 3 Kg dapat diterima dan dijalankan secara konsisten tanpa menimbulkan gejolak sosial, meskipun pengaruhnya tidak dominan dalam analisis kuantitatif.

Identifikasi Alternatif Kebijakan

Pada tahap identifikasi alternatif kebijakan, analisis kebijakan berupaya merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang realistis dan relevan untuk menjawab permasalahan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dalam konteks tata niaga subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul, alternatif kebijakan difokuskan pada upaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi dan memperkuat mekanisme distribusi di tingkat hilir, tanpa menghilangkan fungsi LPG 3 Kg sebagai instrumen perlindungan sosial. Oleh karena itu, alternatif kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas implementasi di tingkat daerah serta sensitivitas sosial dari kebijakan subsidi energi.

Alternatif 1: Penguatan Sistem Verifikasi Berbasis NIK dan Integrasi Data Sosial-Ekonomi dengan MAP

Alternatif kebijakan pertama menekankan pada penguatan mekanisme verifikasi penerima subsidi melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan data sosial-ekonomi, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data P3KE, data penerima yang telah ditetapkan sesuai kriteria (UMKM, petani dan nelayan sasaran) yang telah diupdate secara berkala serta sistem Merchant Apps Pangkalan (MAP). Alternatif ini Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa LPG 3 Kg benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang berhak, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran subsidi akibat lemahnya pendataan konsumen. Dengan sistem verifikasi yang lebih kuat, distribusi LPG 3 Kg dapat dikendalikan berdasarkan identitas dan karakteristik sosial-ekonomi penerima, bukan semata-mata berdasarkan ketersediaan fisik barang. Pertimbangan rekomendasi ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menekankan bahwa ketepatan sasaran subsidi energi sangat bergantung pada integrasi data penerima manfaat dan pemanfaatan sistem digital berbasis identitas, karena pendekatan tersebut terbukti lebih efektif dalam mengurangi *mistargeting* dan kebocoran subsidi dibandingkan mekanisme distribusi terbuka (Muharam, 2025) . Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa penggunaan basis data kesejahteraan yang terintegrasi dengan sistem distribusi di tingkat hilir dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kebijakan subsidi energi, khususnya pada konteks negara berkembang dengan karakteristik distribusi yang kompleks.

Dalam implementasinya, alternatif ini menempatkan MAP tidak hanya sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi sebagai instrumen pengendali distribusi berbasis data. Pangkalan berperan sebagai titik verifikasi awal, sementara pemerintah daerah dan PT Pertamina Patra Niaga berfungsi sebagai pengelola dan pengawas data. Kelebihan utama alternatif ini terletak pada peningkatan aspek keadilan dan akuntabilitas distribusi, namun di sisi lain menuntut kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi pelaksana, serta koordinasi lintas lembaga yang kuat agar integrasi data dapat berjalan efektif.

Alternatif 2: Restrukturisasi Distribusi LPG 3 Kg dan Penataan Peran Pengecer (Sub-Pangkalan Resmi) secara Bertahap serta Penetapan Regulasi HET di Tingkat Sub-Pangkalan

Alternatif kebijakan kedua berfokus pada pembenahan struktur distribusi LPG 3 Kg di tingkat hilir dengan menata peran pengecer sebagai bagian dari sistem distribusi resmi. Dalam alternatif ini, pengecer tidak lagi diposisikan sebagai aktor informal, tetapi secara bertahap diintegrasikan sebagai sub-pangkalan resmi dengan kewajiban dan hak yang diatur secara jelas.

Penataan ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap LPG 3 Kg, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh pangkalan resmi, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada mekanisme pasar yang tidak terkontrol.

Selain itu, alternatif ini juga mencakup penetapan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat sub-pangkalan, sehingga pengendalian harga tidak hanya berhenti di pangkalan resmi, tetapi juga menjangkau titik distribusi yang paling dekat dengan konsumen. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan terhadap harga jual LPG 3 Kg di tingkat pengecer. Kelebihan utama alternatif ini terletak pada peningkatan aksesibilitas dan stabilitas harga, namun tantangannya adalah kebutuhan pengawasan yang lebih intensif serta penyesuaian kapasitas administratif pemerintah daerah dalam mengelola jaringan distribusi yang lebih luas.

Alternatif 3 : Peralihan dari Subsidi Berbasis Komoditas ke Subsidi Langsung (Transfer Tunai)

Rekomendasi peralihan dari subsidi LPG berbasis komoditas menuju subsidi langsung melalui transfer tunai didasarkan pada pembelajaran dari reformasi subsidi energi di beberapa negara, terutama India, yang menerapkan dua skema distribusi secara paralel, yakni subsidi akses/koneksi LPG bagi rumah tangga miskin (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana/PMUY) dan subsidi konsumsi melalui mekanisme *Direct Benefit Transfer (DBT/PAHAL)*, di mana konsumen membeli LPG pada harga pasar dan menerima kompensasi subsidi langsung ke rekening bank mereka (Sharma et.al., 2021). Skema ini terbukti mampu mengurangi kebocoran subsidi, menekan distorsi akibat dual pricing, serta meningkatkan ketepatan sasaran karena subsidi tidak lagi melekat pada produk fisik, melainkan pada individu penerima yang terverifikasi. Model tersebut relevan sebagai rujukan bagi Indonesia mengingat permasalahan subsidi LPG 3 Kg yang masih ditandai oleh mistargeting, dominasi distribusi informal, dan lemahnya pengendalian harga di tingkat hilir. Dengan dukungan basis data kependudukan (NIK) dan data sosial-ekonomi seperti DTKS, Indonesia berpotensi mengadopsi skema serupa melalui pendekatan bertahap, dimulai dari proyek percontohan di daerah, penguatan integrasi data penerima manfaat, serta penyaluran bantuan tunai melalui sistem pembayaran digital atau lembaga keuangan yang mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, subsidi langsung tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang lebih adil dan transparan, tetapi juga sebagai solusi struktural untuk mengatasi kelemahan inheren subsidi LPG berbasis komoditas yang selama ini sulit dikendalikan sepenuhnya

Mengevaluasi Alternatif Kebijakan

Pada artikel ilmiah ini, instrument yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan adalah matriks evaluasi yang merupakan instrumen evaluasi sistematis yang digunakan untuk menilai kelayakan teknis, ekonomi, dan viabilitas politik dari berbagai opsi kebijakan, serta menempati langkah kelima dalam kerangka analisis kebijakan rasional Patton dan Sawicki, yaitu *displaying and distinguishing among alternative policies*. Instrumen ini berfungsi menyajikan perbandingan kelebihan dan kelemahan setiap alternatif secara visual agar pengambil keputusan dapat menentukan opsi kebijakan yang paling optimal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Meltzer, R; Schwartz, 2019). Keunggulan matriks ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan data multidimensi, baik kuantitatif seperti hasil regresi linier maupun kualitatif dari wawancara, serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas penilaian karena setiap alternatif dievaluasi menggunakan kriteria yang sama, seperti efektivitas, keadilan, dan kelayakan. Namun demikian, efektivitas matriks sangat bergantung pada ketersediaan dan

kualitas data yang digunakan, serta memiliki keterbatasan karena pendekatannya yang cenderung linier sehingga kurang responsif dalam menangkap dinamika politik dan perubahan situasi yang berlangsung cepat di lapangan (Patton et al., 2015).

Penggunaan matriks evaluasi dalam penelitian tata niaga LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul memiliki peran yang sangat penting karena didasari oleh sejumlah pertimbangan utama yaitu :

- a. Mengungkap Kesenjangan Implementasi: Temuan penelitian menunjukkan ketidaksinkronan antara regulasi dan praktik di lapangan, tercermin dari fakta bahwa mayoritas pengguna LPG 3 Kg (87%) tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial, yang mengindikasikan lemahnya ketepatan sasaran subsidi.
- b. Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti: Hasil analisis regresi mengonfirmasi bahwa aspek keadilan merupakan determinan paling kuat terhadap efektivitas kebijakan ($\beta = 0,479$). Matriks evaluasi berperan menerjemahkan temuan statistik tersebut ke dalam penilaian alternatif kebijakan yang bersifat operasional dan aplikatif.
- c. Merespons Kompleksitas Distribusi dan Administrasi: Dominasi pembelian melalui pengecer (72%) dibandingkan pangkalan resmi (28%) berimplikasi pada lemahnya pengendalian harga, yang tercermin dari mayoritas responden membeli LPG di atas HET. Di sisi lain, rendahnya kepatuhan administrasi ditunjukkan oleh 79% transaksi tanpa verifikasi KTP serta signifikansi variabel operabilitas administratif ($\beta = 0,372$; $p < 0,001$) menegaskan perlunya evaluasi alternatif kebijakan yang mampu menyeimbangkan kemudahan akses masyarakat dengan ketertiban administrasi berbasis sistem MAP.

Berdasarkan data tersebut, berikut adalah penerapan Matriks Evaluasi Alternatif menggunakan kerangka kerja Patton dan Sawicki yang disusun dengan menggabungkan hasil temuan kuantitatif (regresi), kualitatif (wawancara), dan masukan Masyarakat :

Tabel 4. Matriks Evaluasi Alternatif Kebijakan Tata Niaga LPG 3 Kg

Alternatif Kebijakan	Efektivitas (EFK)	Efisiensi (EFS)	Keadilan (KDL)	Kelayakan Imp. (KLI)	Keberlanjutan Politik (KPol)	Operabilitas Admin (OpAdm)
Alternatif 1: Penguatan Sistem Verifikasi Berbasis NIK dan Integrasi Data Sosial-Ekonomi dengan MAP	ST	T	ST	T	T	ST
Alternatif 2 : Restrukturisasi Distribusi LPG 3 Kg dan Penataan Peran Pengecer (Sub-Pangkalan Resmi) secara Bertahap serta Penetapan Regulasi HET di Tingkat Sub-Pangkalan	T	N	T	R	R	T
Alternatif 3 : Peralihan dari Subsidi Berbasis Komoditas ke Subsidi Langsung (Transfer Tunai)	ST	ST	ST	N	N	N

Keterangan Skor: ST (Sangat Tinggi), T (Tinggi), N (Netral/Sedang), R (Rendah).

Berikut adalah justifikasi alternatif kebijakan disusun untuk menjelaskan dasar pemberian skor pada setiap kriteria evaluasi dalam matriks evaluasi. Penilaian ini didasarkan pada integrasi temuan kuantitatif, khususnya hasil regresi, dan temuan kualitatif dari survei serta

wawancara, sehingga pemilihan alternatif kebijakan mencerminkan kondisi empiris tata niaga subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul.

Alternatif 1: Penguatan Sistem Verifikasi NIK dan Integrasi Data Sosial-Ekonomi dengan MAP

Justifikasi skor :

Alternatif ini memperoleh skor sangat tinggi pada efektivitas (ST) dan keadilan (ST) karena secara langsung menargetkan akar permasalahan utama tata niaga LPG 3 Kg, yaitu ketidaktepatan sasaran subsidi. Temuan survei menunjukkan bahwa 87% pengguna LPG 3 Kg bukan penerima bantuan sosial, sementara hasil regresi menegaskan bahwa variabel keadilan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap efektivitas kebijakan ($\beta = 0,479$; $p < 0,001$). Skor tinggi pada efisiensi (T) diberikan karena alternatif ini mengoptimalkan sistem yang telah tersedia tanpa mengubah struktur subsidi secara mendasar. Dari sisi kelayakan implementasi (T) dan keberlangsungan politik (T), alternatif ini relatif realistis dan dapat diterima publik karena tidak menghapus subsidi, meskipun memerlukan penguatan kapasitas dan sosialisasi. Skor sangat tinggi pada operabilitas administratif (ST) didukung oleh keberadaan MAP yang sudah berjalan serta temuan regresi bahwa operabilitas administratif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas ($\beta = 0,372$; $p < 0,001$).

Alternatif 2: Restrukturisasi Distribusi LPG 3 Kg dan Penataan Pengecer sebagai Sub-Pangkalan Resmi

Justifikasi pemberian skor :

Alternatif ini memperoleh skor tinggi pada efektivitas (T) dan keadilan (T) karena berpotensi memperbaiki akses dan stabilitas harga di tingkat hilir, mengingat 72% responden masih membeli LPG melalui pengecer dan mayoritas harga berada di atas HET. Namun, skor netral pada efisiensi (N) dan operabilitas administratif (T) mencerminkan meningkatnya kebutuhan pengawasan dan kompleksitas administrasi akibat bertambahnya aktor distribusi. Skor rendah pada kelayakan implementasi (R) dan keberlangsungan politik (R) diberikan karena penataan pengecer memerlukan kapasitas pengawasan yang besar dan berpotensi menimbulkan resistensi dari pelaku usaha apabila tidak diikuti regulasi dan insentif yang jelas.

Alternatif 3: Subsidi LPG 3 Kg Berbasis Penerima melalui Mekanisme Transfer Tunai

Justifikasi pemberian skor :

Peralihan dari Subsidi Berbasis Komoditas ke Subsidi Langsung (Transfer Tunai) memperoleh skor sangat tinggi pada efektivitas (ST), efisiensi (ST), dan keadilan (ST) karena secara konseptual mampu menghilangkan kebocoran subsidi dan distorsi harga dengan menyalurkan manfaat langsung kepada penerima yang terverifikasi. Sementara itu, kelayakan implementasi, keberlangsungan politik, dan operabilitas administratif dinilai sedang (N) karena peralihan ke skema transfer tunai membutuhkan kesiapan sistem administrasi, integrasi data, serta komunikasi kebijakan yang kuat untuk mengantisipasi resistensi politik. Temuan regresi yang menunjukkan pengaruh signifikan operabilitas administratif terhadap efektivitas kebijakan ($\beta = 0,372$; $p < 0,001$) namun tingginya transaksi LPG tanpa verifikasi KTP (79%) menandakan bahwa kesiapan implementasi di tingkat hilir masih memerlukan penguatan dan penerapan bertahap.

Menampilkan dan Membedakan Alternatif

Pada tahap ini, alternatif kebijakan yang telah dievaluasi selanjutnya dibedakan secara komparatif untuk mengidentifikasi opsi yang paling rasional dan layak direkomendasikan. Perbedaan alternatif dilakukan dengan membandingkan kinerja relatif masing-masing opsi terhadap seluruh kriteria evaluasi, serta menimbang trade-off yang muncul antara efektivitas, keadilan, efisiensi, dan kelayakan implementasi dalam konteks tata niaga subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul.

Hasil matriks evaluasi menunjukkan bahwa Alternatif 1 yaitu : Penguatan Sistem Verifikasi Berbasis NIK dan Integrasi Data Sosial-Ekonomi dengan MAP memiliki kinerja paling seimbang dan konsisten di hampir seluruh kriteria, khususnya pada aspek keadilan, efektivitas, dan operabilitas administratif. Alternatif ini secara langsung menjawab permasalahan utama kebijakan, yaitu ketidaktepatan sasaran dan lemahnya administrasi distribusi, yang terbukti secara empiris sebagai determinan utama efektivitas kebijakan. Selain itu, alternatif ini relatif layak diterapkan dalam jangka pendek karena memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia dan memiliki tingkat penerimaan politik yang moderat.

Sebaliknya, Alternatif 2 yaitu Restrukturisasi Distribusi dan Penataan Pengecer menunjukkan keunggulan pada peningkatan aksesibilitas dan stabilitas harga, namun kinerjanya kurang konsisten pada aspek kelayakan implementasi dan keberlangsungan politik. Kompleksitas pengawasan serta potensi resistensi dari pelaku distribusi menjadikan alternatif ini lebih tepat diposisikan sebagai kebijakan pendukung (*complementary policy*), bukan sebagai solusi utama.

Sementara itu, Alternatif 3 yaitu Subsidi Langsung melalui Transfer Tunai menawarkan keunggulan konseptual paling tinggi dalam hal efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Namun, penilaian kelayakan implementasi, keberlangsungan politik, dan operabilitas administratif menunjukkan bahwa alternatif ini belum realistis untuk diterapkan dalam jangka pendek di tingkat daerah. Oleh karena itu, alternatif ini lebih tepat dipandang sebagai agenda reformasi struktural jangka panjang yang memerlukan kesiapan sistem, kapasitas administratif, dan dukungan politik yang lebih kuat.

Berdasarkan perbedaan tersebut, Alternatif 1 muncul sebagai opsi kebijakan paling rasional dan *feasible* untuk direkomendasikan dalam konteks Kabupaten Bantul, dengan Alternatif 2 sebagai pendukung implementasi di tingkat hilir dan Alternatif 3 sebagai arah reformasi kebijakan jangka panjang

Evaluasi Alternatif Kebijakan

Dalam kerangka analisis kebijakan Patton dan Sawicki, tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang bertujuan menilai kesesuaian implementasi kebijakan dengan tujuan yang ditetapkan serta menyediakan umpan balik bagi perbaikan kebijakan. Namun, dikarenakan keterbatasan dalam penelitian ini tahap tersebut belum dapat dilaksanakan karena ruang lingkup penelitian difokuskan pada analisis kondisi eksisting, identifikasi masalah, dan perumusan rekomendasi kebijakan berbasis data empiris, bukan pada pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian mencakup hingga tahap perumusan dan pemilihan alternatif kebijakan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait, terutama Pemerintah Daerah melalui DKUKMPP Kabupaten Bantul, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial pada tingkat pusat. Meskipun tidak dilakukan dalam penelitian ini, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan guna meningkatkan ketepatan sasaran, stabilitas harga, dan efektivitas tata niaga LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan tata niaga subsidi LPG 3 Kg di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mencapai tujuan kebijakan, khususnya dalam aspek ketepatan sasaran, stabilitas harga, dan efektivitas distribusi. Temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan nasional dengan praktik di lapangan, yang tercermin dari dominannya pengguna LPG 3 Kg yang bukan penerima bantuan sosial (87%), tingginya ketergantungan masyarakat pada pengecer (72%), serta mayoritas transaksi yang masih dilakukan tanpa verifikasi KTP (79%). Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya pengendalian harga dan masih tingginya harga LPG 3 Kg di atas HET di tingkat konsumen.

Hasil analisis kuantitatif mengonfirmasi bahwa efektivitas kebijakan tata niaga LPG 3 Kg secara signifikan dipengaruhi oleh aspek keadilan dan operabilitas administratif, sementara efisiensi dan keberlangsungan politik tidak menjadi faktor dominan dalam persepsi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan utama kebijakan bukan terletak pada besaran subsidi atau struktur anggaran, melainkan pada lemahnya mekanisme penargetan dan administrasi distribusi di tingkat hilir.

Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan menggunakan matriks evaluasi Patton dan Sawicki, penguatan sistem verifikasi berbasis NIK dan integrasi data sosial-ekonomi dengan Merchant Apps Pangkalan (MAP) dipilih sebagai alternatif kebijakan paling rasional dan layak diterapkan dalam jangka pendek. Alternatif ini dinilai mampu secara langsung menjawab akar permasalahan ketidaktepatan sasaran dan kelemahan administrasi, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan implementasi dan keberterimaan politik di tingkat daerah. Sementara itu, restrukturisasi distribusi dan subsidi langsung melalui transfer tunai diposisikan masing-masing sebagai kebijakan pendukung dan agenda reformasi jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi penguatan tata niaga subsidi LPG 3 Kg di tingkat daerah serta dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan subsidi energi yang lebih adil dan efektif di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *MIXED METHODS Designing and Conducting* (Third Ed). SAGE Publications.
- emedia.dpr.go.id. (2025). *Banggar DPR: Alokasi Anggaran Subsidi LPG 2025 Sangat Mencukupi*. <https://emedia.dpr.go.id/2025/02/04/banggar-dpr-alokasi-anggaran-subsidi-lpg-2025-sangat-mencukupi/>
- Hasanudin, U. (2025). *Bantul Dapat Kuota Tambahan Gas Elpiji 3 Kilogram, Pemkab Pastikan Stok Aman*. Jogjapolitan.Harianjogja.Com. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/02/16/511/1204331/bantul-dapat-kuota-tambahan-gas-elpiji-3-kilogram-pemkab-pastikan-stok-aman>
- KESDM. (n.d.). *Konversi Minyak Tanah ke Gas*. Migas.Esdm.Go.Id. Retrieved March 3, 2025, from <https://migas.esdm.go.id/cms/uploads/Konversi-Mitan-GAS.pdf>
- Kusnandar, V. B. (2025). *Kisruh Distribusi LPG, Ini Anggaran Subsidinya pada 2025*. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomimakro/statistik/67a2e18b9aa96/kisruh-distribusi-lpg-ini-anggaran-subsidinya-pada-2025>
- Maharani, S. (2025). *LPG 3 Kg Langka, Ombudsman Yogyakarta Temukan Harga di Atas HET*. <https://www.tempo.co/politik/lpg-3-kg-langka-ombudsman-yogyakarta-temukan-harga-di-atas-het--1207945>
- Meltzer, R ; Schwartz, A. (2019). *Policy Analysis as Problem Solving : A flexible and evidence-based*

framework. Routledge.

- Muharam, R. ; Budiman. R. ;Nina K. ; Candradewini. C. (2025). Kebijakan subsidi lpg 3 kg di jawa barat: distribusi kesejahteraan, risiko ekologis, dan ekonomi publik 1*. *Manajemen : Jurnal Ekonomi USI*, 7(1), 130–141.
<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/JEUSI/article/view/1265/1377>
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2015). Basic methods of policy analysis and planning. In *Basic Methods of Policy Analysis and Planning* (3rd Ed). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315664736>
- Raharjo, S. (2014). *Cara melakukan Uji Validitas Product Moment dengan SPSS*.
<https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-validitas-product-momen-spss.html>
- Ramadhany, R. (2024). *BUKU SAKU DIGITAL PENGGUNAAN APLIKASI SPSS VER.29*. Fisip IAN UPR.
- Sharma, S ; Tom, M ; Michael, A ; Kayya, B. (2021). *How to Target LPG Subsidies in India : Step 2. Evaluating Policy Options in Jharkhand* (Issue May).
<https://www.iisd.org/system/files/2021-04/target-lpg-subsidies-india-jharkhand.pdf>